

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdullah, R. (2005). *Pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Aziz, Abdul. (2017). *Hukum Tata Negara dan Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Prenada Media Group.
- Budiman, N. P. D. (2005). *Ilmu Pengantar Perundang*. Yogyakarta: UII Pres
- Clarkson H., Oglesby. (1999). *Teknik Jalan Raya Jilid 1*. Alih Bahasa. Jakarta: Gramedia.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. (1997). *Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI)*. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum.
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu perundang-undangan: jenis, fungsi dan materi muatan*. Cet. Ke-7. Yogyakarta: Kanisius.
- Ir Sulistijo Sidarto Mulyo, M. T., & Santoso, B. (2018). *Proyek Infrastruktur & Senketa Konstruksi*. Kencana.
- Kelsen, H. (2017). *General theory of law and state*. Routledge.
- KPUPR, B. (2004). UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan. *Undang. Republik Indonesia. Nomor, 38, 3*.
- Kurnia, M. P. (2007). *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Kusuma, H. H. (1995). *Metodologi Pembuatan Kertas Kerja/Skripsi Ilmu Hukum*.

- Manan, B. (1995). *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Pusat Penerbitan Universitas LPPM, Universitas Islam Bandung.
- Morlok, E. K., & Hainim, J. K. (1985). Pengantar teknik dan perencanaan transportasi.
- Rahman, A. (2015). *Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Teras.
- Ridwan, H. R. (2009). *Hukum administrasi di daerah*. FH UII Press.
- Samad, S. (2003). *Hukum Tata Ruang Wilayah*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Sedarmayanti, G. G. (2012). *Kepemerintahan Yang Baik. & Good Corporate Governance "Tata Kelola Perusahaan Yang Baik"*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Syarif, A. (1987). *Perundang-undangan: Dasar, jenis dan teknik membuatnya*. Jakarta: Bina Aksara.
- Tjandra, W. R. (2009). *Legislative drafting: teori dan teknik pembuatan peraturan daerah*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Trihoni, Y., Sulistyowati, E., & Suwignyo, R. (2016). *Pembangunan Infrastruktur dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Yustitia.
- Trijono, R. (2013). *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Wahid, A. Y., & SH, M. S. (2016). *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Prenada Media.
- Wirjosoegito, S. (2004). *Proses dan Perencanaan Peraturan Perundangan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

## **Internet**

JDIH Kabupaten Sukoharjo, 2023, *Sejarah Lahirnya Kabupaten Sukoharjo*, (15 Juli 2023) dalam <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/sejarah-lahirnya-kabupaten-sukoharjo>. Diakses pada tanggal 19 September 2024, pukul 14:47 WIB.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2024, *Peristiwa Heroik 3 Desember*, (17 Desember 2020) dalam <https://pu.go.id/page/Peristiwa-Heroik-3-Des>. Diakses tanggal 22 September 2024, pukul 22:59 WIB.

SiBIMA, *PETA Jalan Kabupaten Sukoharjo*, (2021-2024) dalam <https://si-bima.sukoharjokab.go.id>. Diakses pada tanggal 28 September 2024, pukul 19:44 WIB.

Solopos.com, Rabu, 19 Juni 2024, 14:30 WIB: *Jalan Rusak di Sukoharjo segera Diperbaiki, Ini Daftarnya*, dalam <https://solopos.espos.id/jalan-rusak-di-sukoharjo-segera-diperbaiki-ini-daftarnya-1944072>. Diakses pada tanggal 28 September 2024, pukul 19:44 WIB.

Wikipedia, 2024, *Kabupaten Sukoharjo*, (terakhir di sunting pada tanggal 5 Juli 2024) dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Sukoharjo](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sukoharjo). Diakses pada tanggal 19 September 2024, pukul 14:45 WIB.

## **Jurnal**

Adif, R. M., & Hendri, R. (2021). Analisis Pembangunan Infrastruktur Jalan terhadap Pertumbuhan Ekonomi UMKM di Bukit Gado-Gado Kota Padang. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 3(4), 161-166.

Alwajir, D. Q. (2022). Problematika Kebijakan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan di Provinsi Banten. *Public Service and Governance Journal*, 3(2), 78-88.

- Amani, A. S., & Buana, C. (2020). Prioritas Penanganan Kerusakan Jalan di Jalan Provinsi di Daerah Surabaya Selatan Ditinjau dari Tingkat Kerusakan Jalan dan Segi Ekonomi. *Jurnal Teknik ITS*, 8(2), 8-13.
- AMYRULLOH, B. (2024). Analisis penyebab pelanggaran lalu lintas oleh pengendara kendaraan bermotor. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(2), 81-103.
- Anggraeni, F. A. (2022). Analisis Peran Pemerintah Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Pajak Penerangan Jalan Bagi Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 2(2).
- Ardani, D., & Thamrin, M. H. (2024). Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara dalam Pemeliharaan Jalan Di Kecamatan Medan Marelan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 3535-3547.
- Asnery, R., Lionardo, A., & Wulandari, N. (2022). Efektivitas program pemeliharaan jalan dan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dimasa pandemi Covid-19. *Tanah Pilih*, 2(2), 100–115.
- Basuki, A. T., & Gayatri, U. (2009). Penentu sektor unggulan dalam pembangunan daerah: studi kasus di Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Jurnal ekonomi & studi pembangunan*, 10(1), 34-50.
- Belareq, F. (2017). Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tering Lama Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat. *E-journal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 701-710.

- Gultom, R. Z., & Tini, A. Q. (2020). Pembangunan infrastruktur dalam Islam: Tinjauan ekonomi dan sosial. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 203-211.
- Kristiawan, P. R., Dewi, D. A. S., & Suharso, S. (2020). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan Berkaitan Dengan Pemeliharaan Jalan (Studi Kasus Jalan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Magelang). *Borobudur Law Review*, 2(1), 30-39.
- Laterissa, D. I., Walsen, S., & Istia, P. (2022). ANALISIS KERUSAKAN JALAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP UMUR RENCANA SERTA PENANGGULANGANNYA PADA JALAN HALULU KECAMATAN TEHORU MALUKU TENGAH. *JURNAL SIMETRIK*, 12(2), 561-567.
- MANULLANG, J. (2024). ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KERUSAKAN JALAN RAYALINTAS DI JALAN CEMARA MEDAN.
- Nur, A. S., Sihabudin, A., & Syadzily, A. H. (2020). Kinerja pengelolaan jalan dan jembatan dalam perspektif pelayanan publik pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang provinsi banten tahun 2017. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 3(1).
- Pratama, J. P., ALW, L. T., & Pinilih, S. A. G. (2022). Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan The Existence of the Position of Ministerial Regulations Against Regional Regulations. *Jurnal Konstitusi*, 19(4), 865-885.

- Raudah, F., & Jamal, A. (2018). Korelasi infrastruktur terhadap kunjungan pariwisata Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 3(4), 651-658.
- Rorimpandey, M. C., & Nurdin, I. (2019). Implementasi kebijakan program pembangunan infrastruktur pedesaan (PIIP). *Manajemen Pemerintahan*, 2(1), 1-8.
- Sasmito, C. (2019). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 6(3).
- SITORUS, S. A. F. (2024). ANALISA FAKTOR-FAKTOR PENGARUH TERHADAP KERUSAKAN PERKERASAN LENTUR JALAN RAYA.
- Suharjono, M. (2014). Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(19), 21-37.
- Sunaryo, J. (2019). PEMANFAATAN INFRASTRUKTUR JALAN UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT. *Rekaman: Riset Ekonomi Bidang Akuntansi dan Manajemen*, 3(3), 191-203.
- Tina, A. (2022). Analisa Faktor Kerusakan Jalan. *Jurnal Ilmu Teknik*, 2(2).
- Udiana, I. M., Saudale, A. R., & Pah, J. J. (2014). Analisa Faktor Penyebab Kerusakan Jalan (Studi Kasus Ruas Jalan WJ Lalamentik Dan Ruas Jalan Gor Flobamora). *Jurnal Teknik Sipil*, 3(1), 13-18.

## **Makalah**

Manan, B. (2000). Wewenang Provinsi, KabuPaten, dan kota dalam rangka otonomi daerah. In *Makalah pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung* (Vol. 13, pp. 1-2).

### **Prosiding**

Pramono, H. A., & Pramesti, F. P. (2016). Skenario Pemeliharaan Jalan di Kota Tangerang Berdasarkan Nilai Sdi. *Prosiding Semnastek*.

### **Skripsi**

Putri, R. A. (2023). *Pengaruh Infrastruktur Jalan, Pendapatan PerKapita dan Kesehatan terhadap Kemiskinan di Indonesia* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi).

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 Tentang Jalan.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo.

**Wawancara**

Inta Candra, Sub Koordinator Bina Teknis Bidang Bina Marga, *Wawancara Pribadi*, Kantor DPUPR Sukoharjo, 15 Mei 2024, pukul 14:28 WIB.